**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOP PADA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN WONOGIRI**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Rudhy Hermawan**

**NIM. 16.01.0029**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTAMANDIRI**

**SURAKARTA**

**2020**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOP PADA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN WONOGIRI**

# Skripsi

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri Surakarta**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Strata**

**Satu (S1) Program Studi Akuntansi**

**Oleh :**

**Rudhy Hermawan**

**NIM. 16.01.0029**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SWASTAMANDIRI**

**SURAKARTA**

**2020**

ii

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOP PADA SATUAN**

# PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

# DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# KABUPATEN WONOGIRI

**Oleh :**

**Rudhy Hermawan**

**NIM. 16.01.0029**

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji

pada tanggal, 4 Juli 2020

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

**Pembimbing** **Ketua Dewan Penguji**

**Merangkap Anggota Dewan Penguji**

**Dr. Abu Bakar Akbar, MM** **Tulus Prijanto, SE.,MH** ` **Anggota Dewan Penguji**

**Estiningtyastuti, SE., MM., M.Hum**

Surakarta, 4 Juli 2020

Mengetahui,

# Amru Sukmajati, SP.,MM

# Ketua STIE Swastamandiri

****

iii

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

# Nama : Rudhy Hermawan

Nim : 16.01.0029

# Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOP PADA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOGIRI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan dan ringkasan – ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti / dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh STIE Swastamandiri batal saya terima.

Surakarta, 4 Juli 2020

Yang Membuat pernyataan

materai 6000

**Rudhy Hermawan**

**NIM. 16.01.0029**

iv

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI**

**SWASTAMANDIRI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, Skripsi dengan judul :

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA BOP PADA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KABUPATEN WONOGIRI**

Oleh :

Rudhy Hermawan

###### NIM. 16.01.0029

Telah saya baca dengan seksama dan telah dinyatakan memenuhi standar ilmiah, baik jangkauannya maupun kualitasnya, sebagai skripsi jenjang pendidikan sarjana (S1)

**Pembimbing :**

# Dr. Abu Bakar Akbar, MM

Tugas akhir ini telah diserahkan kepada Program Sarjana Jurusan Akuntansi STIE Swastamandiri dan telah diterima sebagai syarat memenuhi jenjang pendidikan sarjana (S1)

Surakarta, 4 Juli 2020

**Ketua Program Studi Akuntansi**

# Yuni Pristiwati NW., SE., MSi

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

v

Skripsi ini kami persembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta
2. Istri yang saya sayangi
3. Dosen Pembimbing
4. Sahabat dan teman-teman mahasiswa seangkatan yang telah memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Almamater

**HALAMAN MOTTO**

vi

…Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri....  
(**R. A. Kartini)**

…Jika Anda mendidik seorang laki-laki, maka seorang laki-laki itu akan terdidik. Tapi jika Anda mendidik seorang perempuan, maka satu generasi akan terdidik…,

**(Brigham Young)**

…....... Keramahtamahan dalam perkataan menciptakan keyakinan

Keramahtamahan dalam pemikiran menciptakan kedamaian

Keramahtamahan dalam memberi menciptakan kasih …....

**(Lao Tse)**

**KATA PENGANTAR**

vii

Segala puji bagi Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Adapun judul dari skripsi ini adalah **“Analisis Pengelolaan Dana BOP Pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri ”.**

Skripsi ini tidak mungkin dapat penulis laksanakan dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak yang terkait. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih secara khusus kepada beberapa pihak tertentu :

1. Bapak Amru Sukmajati, SP., MM.. selaku Ketua STIE Swastamandiri Surakarta
2. Ibu Yuni Pristiwati Noer W., SE., Msi, selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
3. Bapak. Dr. Abu Bakar Akbar, MM,. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan waktu dan perhatiannya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Dra. Yuli Bangun Nursanti, M.Pd,. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, yang telah membantu dan memberikan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Akuntansi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya selama penulis menyelesaikan studi di STIE Swastamandiri Surakarta
6. Teman-teman sekelas Angkatan 2016, yang telah melewatkan waktu bersama selama masa studi.

Penulis sadar masih banyak sekali kekurangan dari skripsi ini, dan penulis terbuka terhadap segala saran dan kritik yang membangun. Akhir kata penulis mempersembahkan skripsi ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Wonogiri, …. Juli 2020

Penulis

viii

**DAFTAR ISI**

Halaman Sampul i

Halaman Judul ii

Halaman Pengesahan iii

Halaman Pernyataan Keaslian, bermaterai iv

Halaman Persetujuan v

Halaman Persembahan vi

Halaman Motto vii

Kata Pengantar viii

Daftar Isi ix

Daftar Gambar . xii

Daftar Tabel . xiii

Daftar Lampiran . xiv

Abstrak (Inggris dan Indonesia) xv

BAB I. PENDAHULUAN 1

* 1. Latar Belakang Masalah 1
  2. Perumusan Masalah 5
  3. Batasan Masalah 5
  4. Tujuan Penelitihan 5
  5. Manfaat Penelitihan 5
  6. Sistematika Pembahasan 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 7

2.1. Landasan Teori 7

2.1.1 Politik dan Kebijakan Publik 7

2.1.2 SPNF SKB Wonogiri Sbg Organisasi Sektor Publik 11

2.1.2.1 Pengertian Organisasi 11

2.1.2.2 Tipe Organisasi 11

2.1.3 Pengertian Sektor Publik 12

2.1.4 Pengertian Organisasi Sektor Publik 13

ix

2.2. Penelitian Terdahulu 27

2.3. Kerangka Berpikir 29

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 30

* 1. Jenis Penelitian 30
  2. Lokasi dan Waktu 30
  3. Subyek dan Obyek Penelitian 30
  4. Definisi Operasional 30
  5. Variabel penelitian dan pengukurannya 31
  6. Jenis dan Sumber Data 32
  7. Teknik Pengumpulan Data 32
  8. Teknik Analisis Data 32

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 34

4.1. Pengelolaan Anggaran SPNF SKB 34

4.2 Pembahasan 37

BAB V. PENUTUP 39

* 1. Kesimpulan 39
  2. Saran 40
  3. Keterbatasan Penulisan 40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

**DAFTAR GAMBAR**

x

xi

Gambar 2.1 Pengukuran *Value For Money* 19

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 29

xi

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 27

Table 4.1 Tingkat Ekonomi Pengelolaan Anggaran 37

Table 4.2 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran 37

Table 4.3 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran 38

**DAFTAR LAMPIRAN**

xii

Lampiran 1 Laporan Daya Serap Anggaran Operasional SPNF SKB

Lampiran 2 Blangko Konsultasi Skripsi

xiii

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan kinerja penyelenggaraan anggaran SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2019.

Penelitian ini dilalukan di SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wonogiri dengan obyek penelitian pengelolaan anggaran dan laporan keuangan SPNF Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Wonogiri Tahun 2019. Jenis penelitian ini deskriptif evaluatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) Tingkat ekonomi SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 adalah Ekonomis, Tingkat efisiensi SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sangat Efisien pada Tahun 2019 dan Tingkat efektivitas SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tahun 2019 efektif. (2) Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dan kinerja SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri adalah sangat baik. (3) SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tidak mampu mengoptimalkan pelayanan, dengan alasan subsidi tidak sesuai dengan keadaan masyarakat local.

Kata Kunci : Efektifitas, Efisiensi, Pengelolaan Anggaran

.

xiv

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to describe the performance of the implementation of the SPNF budget of the House of Learning Activities in Wonogiri Regency in 2019 and to evaluate the budget policy in achieving the SPNF goals of the House of Learning Activities.*

*This research was conducted at the SPNF House of Learning Activities in Wonogiri Regency with the object of budget management research and financial reports SPNF of House of Learning Activities (SKB) in Wonogiri Regency in 2019. This type of research was descriptive evaluative with documentation data collection techniques, the analysis technique used in this study was descriptive qualitative.*

*The results of the analysis show that (1) The economic level of the SPNF SKB of the Education and Culture Office of Wonogiri Regency in 2019 is Economical, the efficiency level of the SPNF SKB of the Education and Culture Office of the Wonogiri Regency is very efficient in 2019 and the level of effectiveness of the SPNF of the SKB of the Education and Culture Office of Wonogiri in 2019 effective. (2) Overall budget management and performance of the SPNF SKB of the District Education and Culture Office in Wonogiri is very good. (3) SPNF SKB Wonogiri Regency Education and Culture Office is not able to optimize services, on the grounds that subsidies are not in accordance with the conditions of the local community.*

*Keywords: Effectiveness, Efficiency, Budget Management*

*.*

xiv

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional, dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigm ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalamsatu paket undang-undang yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam sektor Pendidikan, konsep kebijakan otonomi memberi wewenang dan keleluasaan kepada SPNF Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Kabupaten Wonogiri untuk mengelola sendiri anggaran dan pendapatannya guna membiayai kegiatan SPNF Sanggar Kegiatan Belajar ( SKB ) Kabupaten Wonogiri.

Dalam organisasi publik, salah satunya adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB), pengelolaan keuangan harus transparansi yang mulai dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran. Selain itu, akuntabilitas dalam pertanggungjawaban publik juga diperlukan, dalam arti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri merupakan unit pelaksana teknis Dinas yang bernaung pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, dan secara administrasi SPNF SKB bertanggung jawab pada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri yang secara teknis edukasi pelaksana kegiatan atau program kelembagaan dalam pembinaan bidang pendidikan non formal informal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.

Dalam pelaksanaannya pendidikan kesetaraan mempunyai dua fungsi strategis yaitu : (1) menunjang suksesnya wajib belajar pendidikan dasar 12 Tahun terutama bagi anak-anak usia 7-15 tahun yang tidak tertampung disekolah dan (2) memberi  pelayanan pendidikan kepada orang dewasa yang ingin memperoleh pendidikan kesetaraan. Karenanya jangkauan pelayanan pendidikan kesetaraan tidak terbatas pada usia peserta didik, kondisi geografis, demografis dan lainnya. Dengan kata lain bahwa pendidikan kesetaraan menjangkau warga masyarakat yang tidak terjangkau oleh pelayanan pendidikan formal.

Aneka ragam model pelayanan pendidikan kesetaraan untuk menjangkau yang tidak terjangkau, antara lain : layanan jemput bola melalui mobil atau pembelajaran, layanan tutor kunjung dengan sepeda motor dan layanan pendidikan kesetaraan di perbatasan antar kabupaten. Warga masyarakat yang menghadapi sebagai masalah ekonomi, social dan geografis utamanya berkaitan dengan kesulitan memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi keluarga dan anak-anaknya. Dengan keadaan kondisi warga masyarakat yang demikian, maka SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri berperan dalam penuntasan buta aksara, wajar Diknas 9 Tahun, PAUD dan pemberian ketrampilan kepada warga masyarakat.

Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip tersebut, maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Sehingga nantinya kinerja keuangan organisasi publik tersebut akan melahirkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Persoalannya bagaimana pengelolaan keuangan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana BOP Pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri ”.**

##### Perumusan Masalah

Sejauh mana kebijakan Anggaran Pemerintah dapat mencapai tujuan-tujuan pelayanan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, ada dua tahapan pertanyaan yang berurutan untuk menjawabnya, yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan Dana BOP pada SPNF SKB dalam pengertian tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas?

##### Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah dan batasan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan kinerja penyelenggaraan anggaran SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2019

##### Manfaat Penelitian

1. Bagi SPNF Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi SPNF Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Wonogiri dalam upaya memperbaiki pengelolaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan secara keseluruhan.
2. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri Surakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swastamandiri Surakarta.

1. BagiPenulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman, serta sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah ke dalam permasalahan yang sesungguhnya.

##### Sistematika Pembahasan

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

##### BAB II: LandasanTeori

Bab ini berisi tentang berbagai teori yang berkaitan dengan topik penelitian yang penulis lakukan.

##### BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, waktu dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional, variabel dan pengukurannya, teknik analisis data, dan metode analisis data.

##### BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini, data yang dikumpulkan dianalisis berdasarkan teknik analisis data yang telah ditentukan.

##### BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan atas analisis data.

##### BAB II

##### TINJAUAN PUSTAKA

* 1. **Landasan Teori**

1. **Politik dan Kebijakan Publik**

Di era reformasi, tuntutan pemberian otonomi kepada daerah adalah hal yang wajar. Hal tersebut disebabkan 2 alasan, *pertama*, karena intervensi pemerintah pusat yang terlalu besar di masa lalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah (Mardiasmo, 2002;3-4). Arahan dan permintaan yang terlalu besar dari pemerintah pusat menyebabkan inisiatif dan prakarsa daerah cenderung mati sehingga pemerintah daerah sering kali menjadikan pemenuhan aturan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Alasan *kedua*, tuntutan pemberian otonomi muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* ( permainan baru ) yang membawa *newrules* ( aturan baru ) pada semua aspek kehidupan manusia dimasa yang akan datang. Untuk mengahdapi *new game* yang penuh dengan *new rules* tersebut, dibutuhkan *newstrategy* ( strategi baru ). Berbagai Ketetapan MPR yang telah dihasilkan melalui Sidang Istimewa merupakan *new strategy* untuk keluar dari krisis ekonomi dan kepercayaan serta menghadapi globalisasi. Salah satunya adalah Tap MPR No.XV/MPR/1998 tentang ”Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Tap MPR tersebut merupakan landasan hukum keluarnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU ini telah membawa perubahan mendasar pada pola hubungan antar-pemerintahan dan keuangan antara pusat dan daerah. Otonomi daerah perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu negara yang luas yang mampu secara efektif membuat kebijakan public disegala bidang atau pun mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien diseluruh wilayah tersebut. Dengan adanya otonomi diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang, dan otonomi juga diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

7

##### Pengertian Otonomi

Sarundajang (1999:27) mengartikan daerah otonom sebagai hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut ada dua hal mendasar yang terkandung dalam pengertian otonomi daerah, yaitu :

1. Hak dan wewenang yang dimiliki untuk mengelola daerah secara luas,
2. Tanggung jawab yang dipikul dalam pengelolaan tersebut.

Baswir (1998:26) menyatakan bahwa tujuan peningkatan otonomi daerah dapat diperinci menjadi empat, yaitu : *pertama*, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah; *kedua* meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat di masing-masing daerah; *ketiga*, meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat di masing- masing daerah; dan *keempat*, meningkatkan demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di era otonomi daerah dan demokratisasi, pemerintah dituntut untuk mampu merespon berbagai perubahan dan kebutuhan public yang makin kompleks. Untuk itu diperlukan *good governance* atau pemerintahan yang baik untuk menjawab kebutuhan publik yang beraneka ragam. Menurut UNDP (BPKP, 2007:7), karakteristik *good governance* adalah sebagai berikut:

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya.
2. *Rule of Law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hokum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency* yang dibangun atas dasar kebebasan arusinformasi.
4. *Responsiveness*. Setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap *stakeholders*.
5. *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur.
6. *Equity*. Semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness dan efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan produknya sesuai dengan yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*), bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga s*takeholders*.

##### Pengertian Politik

Ada beberapa hal penting untuk dapat mendefinisikan politik,yaitu :

1. Politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya serta dengan negara-negara lain (Saltou,1961:4).
2. Politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan (Laswelll dan Kaplan,1950).
3. Politik (atau ilmu politik) adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan publik (David Easton,1971:128).
4. Kebijakan Publik

Ada beberapa definisi tentang kebijakan publik, yaitu :

1. Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) di mana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Carl Friedrich, 1963:79).
2. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/ tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (James Anderson, 1984:3).

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu kebijakan publik. *Pertama*, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintahdalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir, kelima, kebijakan publik, paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

##### SPNF SKB Wonogiri Sebagai Organisasi Sektor Publik

1. **Pengertian Organisasi**

Menurut Sutarto, organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Sutarto,1989:36).

Organisasi menurut Gibson dan kawan-kawan adalah organisasi sebagai kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai berbagai tujuan yang tidak dapat dicapai hanya dengan kegiatan satu orang secara sendirian (Muhyadi, 1989:5).

Pengertian lain organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerjasama dengan cara yang terstruktur untukmencapai tujuan atau sejumlah sasaran tertentu yang telah ditetapkan bersama (Mahsun, 2006:1).

1. **Tipe Organisasi**

Tujuan tiap-tiap organisasi sangat bervariasi tergantung pada tipe organisasi. Pada dasarnya terdapat 4 tipe organisasi (Mahsun, 2006:5), yaitu :

1. *Pure Profit Organization*

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor dan kreditor.

1. *Quasi-ProfitOrganization*

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud utama memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor pemerintah, kreditor, dan para anggota.

1. *Quasi-NonprofitOrganization*

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh keuntungan. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, investor pemerintah, dan kreditor.

1. *Pure-NonprofitOrganization*

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan/atau jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya.

##### Pengertian Sektor Publik

Sektor publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum (Mahsun,2006:7).

1. **Pengertian Organisasi Sektor Publik**

Organisasi sector public bukan semata – mata organisasi social yang *non-profit oriented*, karena organisasi sektor publik ada yang bertipe *quasi-non profit*. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada public yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hokum (Mahsun,2006:14).

1. Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

1. Berapa biaya atas rencana - rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut(pendapatan)

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi (Mardiasmo, 2002:61) :

1. Aspekperencanaan
2. Aspekpengendalian
3. Aspek akuntabilitaspublik

##### Fungsi Anggaran Sektor Publik

Fungsi anggaran sektor publik antara lain (Mardiasmo, 2002:63) :

1. Sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

1. Sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

1. Sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

1. Sebagai alat politik (*Political Tool*)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas - prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

1. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Anggaran merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

1. Sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*) Anggaran merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.
2. Sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya aga rbekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

1. Sebagai alat menciptakan ruang publik (*Public Sphere*)

Anggaran public tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Masyarakat dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

##### Jenis-jenis Anggaran Publik

Jenis anggaran publik ialah (Mardiasmo, 2002:66) :

* 1. Anggaran Operasional

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menajalankan pemerintahan.

* 1. Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.

##### Prinsip-prinsip Anggaran Publik

Prinsip-prinsip anggaran publik adalah (Mardiasmo, 2002:67) :

1. Otoritas oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

1. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

1. Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum.

1. *Nondiscretionary Appropriation*

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

1. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan.

1. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *under estimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.

1. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.

1. Diketahui publik

Anggaran harus di informasikan kepada masyarakat luas.

1. Evaluasi Pengelolaan Anggaran Melalui *Value For Money* (Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas)

Sektor public sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya.

1. Elemen *Value ForMoney*

*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu :

* + - 1. Ekonomi:

pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh aman organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

* + - 1. Efisiensi:

pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

* + - 1. Efektivitas:

Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output.*

##### Input

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas.

##### Output

Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Ringkasnya, output merupakan kenaikan nilai atau nilai tambah.

##### Outcome

Outcome adalah dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

*Value for money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Pengukuran Value For Money

Tujuan

Outcome

Output

Proses

Input

Nilai Input (Rp)

Ekonomi (Hemat)

Efektivitas

Efisiensi

(berdaya Guna)

*Cost - Effectiveness*

**Gambar 2.1 Pengukuran *Value For Money***

Sumber : (Mardiasmo, 2002:132)

1. Manfaat *Value For Money*

Konsep *value for money* sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena pemakaian konsep tersebut akan memberi manfaat berupa (Halim, 2002:14) :

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apayang telah direncanakan dan tepatsasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Dengan menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah, maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu di lakukan penghematan dalam pemakaian sumberdaya.
4. Alokasibelanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan public *cost awareness* sebagai akar dari akuntablitas publik.
6. Teknik Pengukuran *Value ForMoney*

Ada 3 cara teknik pengukuran *Value For Mon*ey, yaitu (Mahsun, 2006:186) :

1. Tingkat Ekonomi

Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomi memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya.

Tingkat Ekonomi :

|  |  |
| --- | --- |
| Realisasi Pengeluaran | X 100% |
| Anggaran Pengeluaran |

Kriteria Ekonomi adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x <100%) berarti ekonomis.
2. Jika diperoleh nilai sama dari 100% (x =100%)berarti ekonomis berimbang.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x >100%) berarti tidak ekonomis.
4. Tingkat Efisiensi

Mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan.

Tingkat Efisiensi :

Kriteria Efisiensi adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti **efisien**.
2. Jika diperoleh nilai sama dari 100% (x =100%) berarti **efisiensi berimbang**.
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x >100%) berarti **tidak efisien**.
4. Tingkat Efektivitas

Mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik. Pengukuran tingkat efektivitas memerlukan data-data realisasi pendapatan dan anggaran atau target pendapatan.

Tingkat Efektivitas :

Kriteria Efektivitas adalah :

1. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x <100%) berarti **tidak efektif.**
2. Jika diperoleh nilai sama dari 100% (x =100%) berarti **efektivitas berimbang.**
3. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti **efektif.**
4. Pengukuran Kinerja Sektor Publik
5. Definisi Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.

##### Definisi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah :

1. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu perusahaan dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Gary Siegel dan Helene Romanouskan - Marconi,1989:199).
2. Penilaian kinerja merupakan suatu perencanaan, pengumpulan, dan mengevaluasi bukti-bukti yang cukup, relevan, material, dan kompeten oleh pemeriksaan yang bebas dengan sasaran untuk menentukan apakah manajemen atau para karyawan suatu unit usaha telah atau belum menerima dan melaksanakan prinsip- prinsip akuntansi, kebijakan-kebijakan manajemen, ataunorma-norma operasional dengan tepat untuk mencapai penggunaan sumber-sumber secara ekonomis, efisien, dan efektif, kemudian dari bukti-bukti atas sasaran pemeriksaan tersebut pemeriksa menarik kesimpulan, merumuskan saran-saran perbaikan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Setyawan, 1988:21).
3. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya,termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson,2002).
4. Pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi (Lohman,2003).

##### Aspek-aspek Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Oleh karena sifat dan karakteristiknya yang unik, maka organisasi sektor publik memerlukan ukuran penilaian kinerja yang lebih luas, tidak hanya tingkat laba, efisiensi, dan ukuran finansial. Pengukuran kinerja sektor publik meliputi aspek-aspek antara lain (Mahsun, 2006:31) :

1. Kelompok masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
2. Kelompok proses (*process*) adalah ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Kelompok keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
4. Kelompok hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Kelompok manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Kelompok dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif.

##### Tujuan sistem pengukuran kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja adalah (Mardiasmo,2002:122) :

1. Untuk mengkomunikasikan strategisecara lebih baik (*top down and bottomup*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yangrasional.

##### Manfaat pengukuran kinerja

Manfaat pengukuran kinerja antara lain (BPKP, 2000) :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif tas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

##### Ukuran kinerja organisasi sektor publik menurut Agus Dwiyanto (1995):

1. Produktivitas
2. Kualitaslayanan
3. Responsivita
4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas

Menurut Kumorotomo (1995):

1. Efisiensi
2. Efektivitas
3. Keadilan (*equity*)
4. Daya tanggap (*responsiveness*)

##### Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan / atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (BPKP,2000). Sementara menurut Lohman (2003), indikator kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target-target dan tujuan organisasi.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Penentuan indicator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut (Mahsun, 2006:73):

1. Biaya pelayanan (*cost ofservice*)
2. Penggunaan(*utilization*)
3. Kualitas dan standar pelayanan (*quality andstandards*)
4. Cakupan pelayanan(*coverage*)
5. Kepuasan(*satisfaction*)

##### Estimasi Indikator Kinerja

Suatu unit organisasi perlu melakukan estimasi untuk menentukan target kinerja yang ingin dicapai pada periode mendatang. Penentuan target tersebut didasarkan pada perkembangan cakupan pelayanan atau indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan (Mardiasmo, 2002:136):

1. Kinerja tahun lalu
2. *Expert Judgment*
3. *Trend*

Di mana :

Y= indikator kinerja

A= indikator kinerja autonomous

T = time lag

Regresi

**Y = a + b1 x1 + b2 x2 +**

##### Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud:

1. Dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.
2. Digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
4. **Penelitian Terdahulu**

Sebelum penulis melangkah untuk melakukan penelitian ini, penulis mempelajari dan membaca penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, untuk menjaga keaslian penelitian maka dapat dibandungkan dengan peelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain :

**Tabel 2.1 Penelitian - Penelitian Terdahulu :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Peneliti  (Tahun) | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
| 1 | Karsiati, dkk. (2019) | *Pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pada Kelompok Bermain Ceria Kota Semarang* | Hasil penelitian menunjukan bahwa Sistem Informasi Akuntansi sangat diperlukan oleh sebuah perusahaan maupun lembaga pendidikan. Terlihat dari pembahasan sistem informasi akuntansi sudah dilakukan atau diterapkan di beberapa lembaga pendidikan, terutama dalam sistem kas masuk dan kas keluar. Sistem informasi akuntansi yang sudah berjalan baik di lembaga pendidikan, akan sangat membantu lembaga pendidikan tersebut untuk mencegah kecurangan selisih antara kas masuk dengan kas keluar dan tidak terjadi tindakan – tindakan penyelewengan yang dapat merugikan lembaga pendidikan. |
| 2 | Eka Suaib (2015) | *Analisis Iplementasi Kebijakan Pemberian Dana Bantuan Pendidikan (BOP) Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar* | peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar di telah dilaksanakan namun relatif belum berhasil secara optimal serta adanya faktor - faktor yang menghambat implementasi kebijakan pemberian dana bantuan operasional pendidikan (BOP). |
| 3 | Hani Fitria (2014) | *Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*  *(Studi pada SMK PGRI Pandaan)* | menyimpulkan bahwa pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menunjukkan hasil yang efektif. Hal ini ditunjukan dengan hasil keseluruhan perhitungan yang  mencakup indikator ketepatan sasaran mempunyai nilai rata-rata 3,67, indikator sosialisasi program dinyatakan efektif dengan hasil perhitungan rata-rata 3,62, indikator tujuan program dinyatakan efektif dengan hasil perhitungan rata-rata 3,55 dan indikator pemantauan program dinyatakan  efektif dengan menunjukkan hasil perhitungan nilai rata-rata 3,47. Apabila diprosentasekan, penelitian ini menunjukkan bahwa SMK PGRI Pandaan  sudah efektif dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar 71,6% |

1. **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir ini digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat. Atau, bisa diartikan sebagai mengalirkan jalan pikiran menurut kerangka logis atau kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Untuk membuktikan kecermatan penelitian, dasar dari teori tersebut perlu diperkuat  hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Untuk lebih detailnya maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar skema kerangka pemikiran berikut :

Dana BOP

Pengelolaan Anggaran SPNF

Hasil Penelitian

Pengelolaan Dana BOP

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**

##### BAB III

##### METODOLOGI PENELITIAN

1. **Metode Penelitian**

**Metodologi penelitian** adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, di antaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu.  Keinginan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian..

Menurut Sugiyono (2003 : 11) menyatakan bahwa Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut Sugiyono (2003 : 14) penelitian kuantitatif, adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode ini memberikan penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi objek penelitian dan memberikan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Tipe hubungan dalam penelitian ini adalah korelasional, yaitu sekadar menemukan fakta yang berkaitan dengan teori/masalah yang diteliti. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

27

##### Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek

Subjek penelitian dalam studi kasus ini adalah SPNF Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Wonogiri

1. Objek

Objek penelitiannya adalah pengelolaan anggaran dan laporan keuangan SPNF Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Wonogiri Tahun 2019.

##### Data Penelitian

##### Jenis dan Sumber Data

##### Dalam penelitian ini, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan dipublikasikan, dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan data bulanan yang mendukung penelitian.

##### Teknik Pengumpulan Data

##### Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen- dokumen, seperti gambaran umum organisasi dan laporan keuangan yang dibutuhkan.

##### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Sugiono (2012:26) mendefinisikan analisis deskriptif yaitu analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Deskriptif memberikan penggambaran terhadap berbagai permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dan memberikan suatu kesimpulan yang bersifat umum. Tipe hubungan dalam penelitian ini adalah korelasional, yaitu sekadar menemukan fakta yang berkaitan dengan teori/masalah yang diteliti. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan *value for money*; yaitu tingkat ekonomi, tingkat efisien, dan tingkat efektivitas.

Menggunakan 3 cara teknik pengukuran *Value For Money*, dengan rumus sebagai berikut : :

1. Tingkat Ekonomi:

|  |  |
| --- | --- |
| Realisasi Pengeluaran | X 100% |
| Anggaran Pengeluaran |

1. Tingkat Efisiensi:

|  |  |
| --- | --- |
| Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan | X 100% |
| Realisasi pendapatan |

1. Tingkat Efektivitas:

|  |  |
| --- | --- |
| Realisasi Pendapatan | X 100% |
| Anggaran Pendapatan |

##### BAB IV

**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

##### Pengelolaan Anggaran SPNF SKB

Dalam menghitung anggaran SPNF SKB, menggunakan 3 cara teknik pengukuran *Value For Money*, yaitu :

##### Tingkat Ekonomi:

Kriteria Ekonomi adalah :

* Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti **ekonomis**.
* Jika diperoleh nilai sama dari 100% (x =100%) berarti **ekonomis berimbang**.
* Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x >100%) berarti **tidak ekonomis**.

##### Perhitungan :

x <100%, maka pengelolaan pengeluaran anggaran SPNF SKB adalah **Ekonomis.**

##### Tingkat Efisiensi:

Kriteria Efisiensi adalah :

* + - Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti **efisien**.
    - Jika diperoleh nilai sama dari 100% (x =100%) berarti **efisiensi berimbang**.
    - Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti **tidak efisien**.

31

##### Perhitungan belanja ATK :

(x=100%), maka pengelolaan pengeluaran anggaran belanja ATK pada SPNF SKB adalah **Efisiensi berimbang.**

##### Perhitungan belanja Telephon :

(x<100%), maka pengelolaan pengeluaran anggaran belanja Telephon pada SPNF SKBadalah **Efisien**

##### Perhitungan belanja Air :

(x<100%), maka pengelolaan pengeluaran anggaran belanja air pada SPNF SKB adalah **Efisien**

##### Perhitungan belanja Listrik :

(x<100%), maka pengelolaan pengeluaran anggaran belanja listrik pada SPNF SKB adalah **Efisien**

##### Tingkat Efektivitas:

Kriteria Efektivitas adalah :

* Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x <100%) berarti **tidak efektif**.
* Jika diperoleh nilai sama dari 100% (x =100%) berarti **efektivitas berimbang**.
* Jika diperoleh nilai lebih dari100% (x>100%) berarti **efektif**.

##### Perhitungan belanja ATK :

(x=100%), maka pengelolaan Pendapatan anggaran belanja ATK pada SPNF SKB adalah **Efektif berimbang.**

##### Perhitungan belanja Telepon :

x >100%, maka pengelolaan pendapatan anggaran pada SPNF SKB adalah **Efektif.**

##### Perhitungan belanja air :

x >100%, maka pengelolaan pendapatan anggaran pada SPNF SKB adalah **Efektif.**

##### Perhitungan belanja listrik :

x >100%, maka pengelolaan pendapatan anggaran pada SPNF SKB adalah **Efektif.**

##### Pembahasan

1. Pengelolaan Anggaran SPNF SKB
2. Tingkat Ekonomi

##### Tabel 4.1 Tingkat Ekonomi Pengelolaan Anggaran

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TINGKAT EKONOMI** | |
| Tahun 2019 | 88.35% | Ekonomis |

Sumber : Data primer diolah, 2020

Seperti pada tabel 4.1 diatas, pada Tahun 2019, tingkat ekonomi di SPNF SKB Wonogiri adalah Ekonomis (88.35%), yang berarti SPNF SKB Wonogiri dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan (menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif).

1. Tingkat Efisiensi

##### Tabel 4.2 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TINGKAT EFISIENSI** | |
| Belanja ATK | 100% | Efisien |
| Belanja Telepon | 95.05% | Efisien |
| Belanja Air | % | Efisien |
| Belanja listrik | 89.84% | Efisien |

Sumber : Data primer diolah, 2020

Dari tabel 4.2 diatas, pada pengelolaan Anggaran belanja ATK, Belanja Telepon, Belanja Air dan belanja Listrik tingkat efisiensi di SPNF SKB Wonogiri adalah Efisien, yang berarti SPNF SKB Wonogiri dapat menggunakan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan, dalam hal ini adalah subsidi dari pemerintah untuk SPNF SKB Wonogiri, sesuai atau lebih besar dari realisasi pendapatan SPNF SKB Wonogiri.

1. Tingkat Efektivitas

##### Tabel 4.3 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Anggaran

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TINGKAT EFEKTIVITAS** | |
| Belanja ATK | 100 % | Efektif |
| Belanja Telepon | 103.85 % | Efektif |
| Belanja Air | 176.900 % | Efektif |
| Belanja listrik | 126.35 % | Efektif |

Sumber : Data primer diolah, 2020

Dari tabel 4.3 diatas, pada pengelolaan Anggaran belanja ATK, Belanja Telepon, Belanja Air dan belanja Listrik, tingkat efektivitas di SPNF SKB Wonogiri adalah Efektif, yang berarti tingkat pencapaian hasil lebih kecil dari target yang ditetapkan atau realisasi anggaran SPNF SKB Wonogiri hasilnya lebih besar dari target anggaran SPNF SKB Wonogiri.

##### BAB V

**PENUTUP**

##### Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat ekonomi SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sudah dapat dikatakan bagus karena Tahun 2019 adalah Ekonomis, Tingkat efisiensi SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sangat Efisien pada Tahun 2019 dan Tingkat efektivitas SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri juga efektif di tahun 2019,. Hal ini disebabkan karena masyarakat sekitar sudah memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, sehingga masyarakat berlomba untuk mendapatkan pelatihan atau keterampilan fungsional.
2. Secara keseluruhan pengelolaan anggaran dan kinerja SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri adalah sangat baik. SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri dapat mengelola anggaran secara mandiri, dan subsidi dari pemerintah yang mengakibatkan SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri berada dalam kondisi yang efisien dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
3. SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri tidak mampu mengoptimalkan pelayanan, dengan alasan subsidi tidak sesuai dengan keadaan masyarakat lokal, yang meliputi kondisi lingkungan geografis dan perilaku pentingnya pendidikan ketrampilan atau pendidikan masyarakat di wilayah kerja SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.

36

##### Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian, maka dapat diusulkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah, subsidi yang diberikan kepada SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri serta kebutuhan masyarakat lokal. Apabila subsidi yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan, maka subsidi tersebut tidak akan bermanfaat atau tidak akan digunakan. Contoh, pelaksanaan kursus keterampilan masyarakat didaerah terpencil.
2. Bagi SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, memberikan penyuluhan atau identifikasi kepada masyarakat agar kesadaran dan kepedulian masyarakat tentang pendidikan meningkat, yang nantinya akan berimbas dengan semakin banyaknya masyarakat yang ingin belajar di SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri sehingga dapat meningkatkan efektivitas SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri (dalam bentuk realisasi pendapatan) dan mencapai tujuan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing.
3. Dan bagi SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, untuk mengatur manajemen SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, baik itu karyawan ataupun masyarakat yang ingin mendapatkan program kursus keterampilan atau pendidikan masyarakat wajib mengikuti prosedur pendaftaran yang berlaku.

##### Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini mungkin masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Kekurangan ini disebabkan oleh adanya beberapa hal, yaitu :

1. Keterbatasan pengalaman, kemampuan, tenaga, dan waktu yang dimiliki penulis sehingga tidak bisa melakukan penelitian secara maksimal yang mungkin kurang bisa mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pada SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri.
2. Terbatasnya data yang digunakan dalam penelitian yang mungkin masih bisa lebih banyak lagi yang dapat dipergunakan.

##### DAFTAR PUSKTAKA

Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Pertama. Jakarta : Salemba Empat

Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit AIPI.

Aheruddin. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*.

Anderson, James E. 1984. *Public Policy Making.* New York : Holt, Reinhart and Winston

Baswir, Revrisond. 1998. *Akuntansi Pemerintah Daerah. Edisi 3.* Yogyakarta : BPPE

Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Sektor Publik*. Yogyakarta : Makalah Universitas Gajah Mada

Easton, David. 1971. *The Polititical System.* New York : Alfred A. Knopf, Inc

Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. New York : McGrow-Hill

Johny Setyawan. 1988. *Pemeriksaan Kinerja (Performance Auditing).* Edisi ke satu. Yogyakarta : BPPE

Laswell, Harold D dan Kaplan. 1950. *Contemporary Politican Science*. New York : World Publishing Co.

Lohman. 2003. Indikator Kinerja. Tersedia online mohmahsun.blogspot.com/2011/04/indikatorkinerja

Mahsun, Moh. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.

Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi

Moh. Mahsun, Firma Sulistiyani, and H. Andre P. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE.

Muhyadi. 1989. *Organisasi, Teori, Struktur dan Proses*. Yogyakarta : Depdikbud

Robertson, Gordon. 2002. *Review Kinerja.* Lokakarya Review Kinerja. Yogyakarta : BPKP dan Executive Education

Saltou, Roger F. 1961. *An Introduction to Politics*. London : Longmans

Sarundajang. 1999. *Arus Balik Pemerintahan ke Daerah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan

Siegel, G. dan H. R. Marconi. 1989. Behavioral Accounting. South Western. Publising, Co. Cincinnati OH

Sugiyono. 2003. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.CV

Suryo, Djoko. 2004. *Penduduk dan Perkembangan Kota Yogyakarta 1900-1990*. Surabaya: The 1st International Conference on Urban History Surabaya, August 23rd-25th 2004.

Sutarto. 1989. *Dasar-Dasar Organisasi.* Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Tangkilis, Hessel N.S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

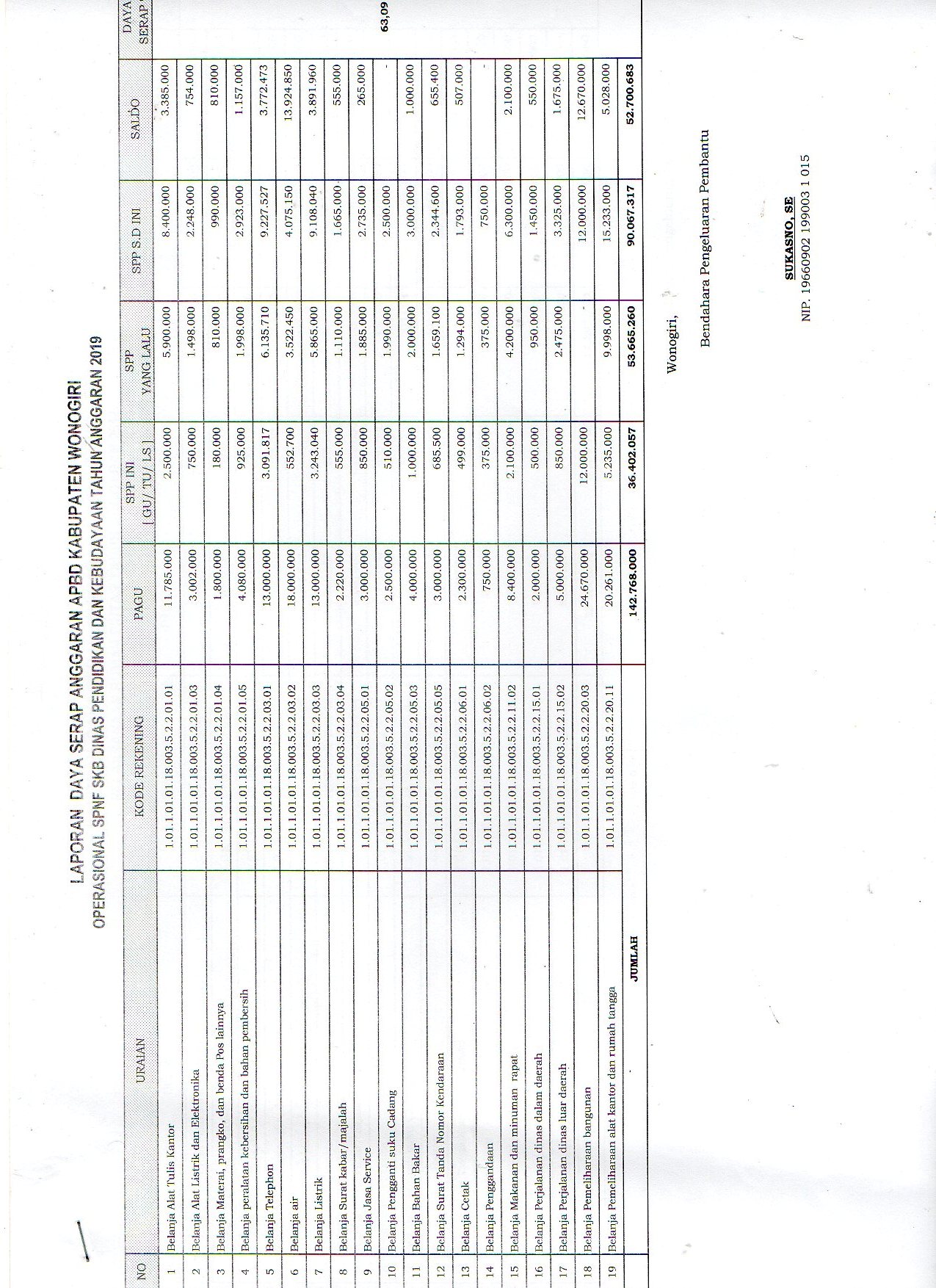
Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Depdagri

Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta : Depdagri

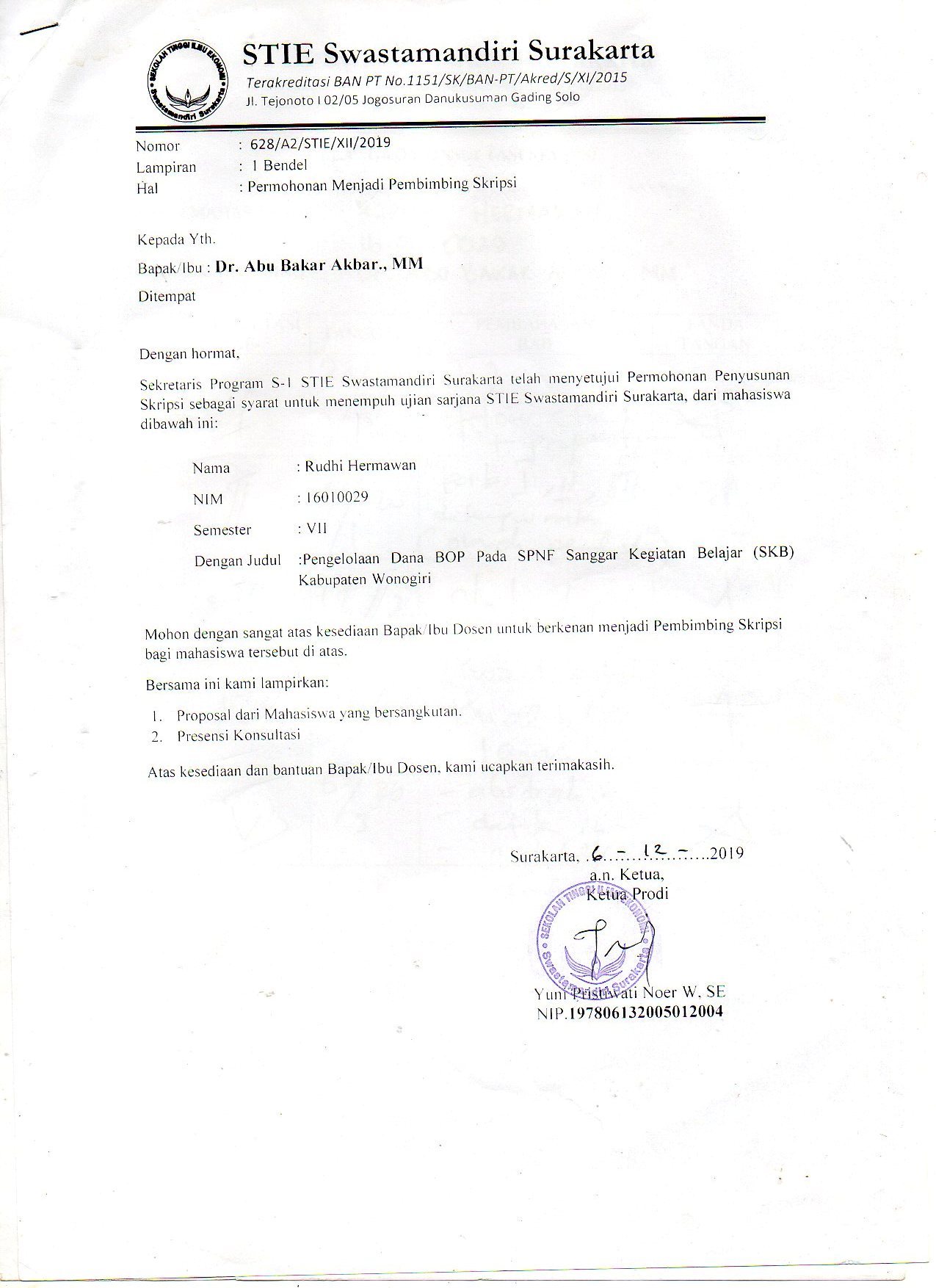
*https://www.wonogirikab.go.id. 2010. Kondisi Geografis Kota Wonogiri.*

*https://*[*www.wikipedia.com.*](http://www.wikipedia.com/) *2010. Bulusulur, Wonogiri*.

*https://*[*www.tkpbulusaribulusulur.blogspot.com,*](http://www.tkpktegalpanggung.blogspot.com/)



Lampiran 1



Lampiran 2

